

Manajemen Strategik Pemberdayaan Ekonomi UMKM Bagi Masyarakat Menengah Kebawah dalam Rangka Menangkal Paham Radikalisme dan Terorisme di Era Revolusi Industri 4.0

**Adji Seputro SE MM
Dosen Prodi Manajemen – Fakultas Ekonomi
Universitas Pandanaran Semarang**

Abstrak

Pembahasan tentang Ekonomi Pertumbuhan dikaitkan dengan Pemberdayaan UMKM oleh pemerintah saat ini menjadi sangat penting dalam upaya merumuskan kebijakan strategis. Kebijakan Strategis diambil dari konsep Pengembangan Sumber Daya Manusia Indonesia yang sangat beragam di Indonesia dan kaitan dengan Manajemen strategik yakni arah pengembangan UMKM di satu sisi. Sumber Daya Manusia selalu yang dikaitkan dengan sumber daya manusia potensial terutama dari Masyarakat Menengah ke bawah yang diharapkan memiliki peran aktif dalam partisipasi kewarganegaraan.

Mereka mengambil prakarsa membentuk organisasi dan penguatan komunitas yang menggerakkan ekonomi komunitas sebayanya terutama dalam bingkai Komunitas UMKM. Program penguatan Pemberdayaan ekonomi UMKM akan membawa Sumber Daya manusia berpotensi tidak hanya dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial, keamanan perbatasan, dan kriminalitas.

Dalam indeks yang diterbitkan oleh UNDP (2017) partisipasi ekonomi dan sosial politik mereka sebagai warga negara jauh melampaui negara- negara lain di Asia. Tantangan yang tidak mudah bagi sumber daya manusia pada UMKM - UMKM saat ini di era revolusi industri 4.0 adalah integrasi pemanfaatan internet dengan lini produksi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dan informasi. Pendalaman konsep Manajemen Strategik yang dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia pada UMKM di Indonesia memiliki semangat dan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Secara kasar hal itu dibuktikan dengan tingginya partisipasi pemuda di sektor usaha.

Namun Partisipasi mereka tidak diiringi dengan kesempatan ekonomi lewat pemberdayaan UMKM dari Pemerintah. Saat ini Sumber Daya Manusia Indonesia menempati level menengah dalam pemberian kesempatan ekonomi terutama kaum muda dibandingkan dengan beberapa negara asia. Padahal keterampilan ekonomi tidak hanya penting bagi mereka untuk tumbuh menjadi warga negara yang kuat dan mandiri, tetapi efektif menjadi mekanisme dan alat mencegah dan menanggulangi terorisme. Pemberdayaan Ekonomi lewat partisipasi di UMKM menjadi salah satu pendekatan yang digunakan negara baik dalam proses deradikalisasi dan terorisme. Karena itu, pemberdayaan ekonomi bagi Sumber daya Manusia potensial menjadi strategis tidak hanya memberi fondasi mereka untuk terlepas dari masa lalu, kelompok kekerasan, termasuk terorisme, tetapi juga menciptakan kepercayaan diri untuk menolak ajakan melakukan kekerasan dan kegiatan kriminal lainnya.

Kata Kunci : *Manajemen Statagik, Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan ekonomi UMKM, Deradikalisasi Dan terorisme*

1. Pendahuluan

Belum kokohnya fundamental perekonomian Indonesia mendorong pemerintah untuk membangun struktur ekonomi dengan mempertimbangkan keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi.

Dari lima Prinsip Pemberdayaan UMKM Menurut Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 UU No.20/2008 tentang UMKM , prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM bermuara pada salah satu peningkatan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah keterkaitan dengan prospek usaha yang kurang jelas serta perencanaan, visi dan misi yang belum mantap. Hal ini terjadi karena umumnya UMKM bersifat income gathering yaitu menaikkan pendapatan, dengan ciri-ciri sebagai berikut: merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan (bankable), dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan dari adanya krisis global namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan yang dihadapi sangat banyak dan lebih berat. Hal itu dikarenakan selain dipengaruhi secara tidak langsung krisis global tadi,

UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan seperti masalah upah buruh, ketenaga kerjaan dan pungutan liar, korupsi dan lain-lain. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM, yaitu adanya liberalisasi perdagangan, seperti pemberlakuan ASEAN- China Free Trade Area (ACFTA) yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Disisi lain, Pemerintah telah menyepakati perjanjian kerja sama ACFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan UMKM agar mampu bersaing. Sebagai contoh kesiapan kualitas produk, harga yang kurang bersaing, kesiapan pasar dan kurang jelasnya peta produk impor sehingga *positioning* persaingan lebih jelas. Kondisi ini akan lebih berat dihadapi UMKM Indonesia pada saat diberlakukannya ASEAN Community yang sudah dilaksanakan dari tahun 2015. Apabila kondisi ini dibiarkan, UMKM yang disebut mampu bertahan hidup dan tahan banting pada akhirnya akan bangkrut juga. Oleh karena itu, dalam upaya memperkuat UMKM sebagai fundamental ekonomi nasional, perlu kiranya diciptakan iklim investasi domestik yang kondusif dalam upaya penguatan pasar dalam negeri agar UMKM dapat menjadi penyangga (*buffer*) perekonomian nasional.

Pemberdayaan Ekonomi UMKM adalah langkah awal dalam meningkatkan potensi daya saing UMKM. Pemerintah mempunyai peran strategik dalam membuat kebijakan penting yang setidaknya mampu mengurai faktor faktor yang menjadi tantangan bagi UMKM yakni agar dapat memanfaatkan keuntungan melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional tersebut (Yuhua & Bayhaqi, 2013). Pertama, UMKM perlu meningkatkan kemampuan teknis dan operasional untuk mencapai standar global perusahaan multinasional. Terkait dengan hal tersebut, UMKM perlu mendapatkan akses modal yang memadai agar dapat melakukan investasi pada proses produksi. Tantangan selanjutnya adalah pada sumber daya manusia (SDM).

Dengan budaya dan struktur kerja informal, dan tidak adanya rencana karir yang jelas, UMKM sangat sulit dalam meningkatkan kualitas SDM atau menarik SDM yang profesional. Sementara perubahan dalam business practices merupakan tantangan terakhir yang harus dihadapi oleh UMKM untuk meningkatkan daya saing dalam Global Value Chain (GVC). Tantangan tersebut meliputi efisiensi dalam menghadapi Revolusi Industri keempat.

Revolusi industri keempat disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Inovasi yang diawali dengan besarnya data di internet dan penggunaan *cloud* mengubah produk industri. Serta mengubah proses produksi dan pemasaran produk. Bahkan mengubah gaya hidup masyarakat karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Secara umum revolusi industri keempat ditandai dengan *full automation*, proses digitalisasi, dan penggunaan alat elektronik dengan sistem informatika. Menurut Sommer, 2015 (dalam Roblek, Mesko, Krapez, 2016), perubahan akibat inovasi tersebut akan berdampak pada industri manufaktur, sektor pelayanan dan jasa, serta kebijakan pemerintah.

Bahkan akan mempengaruhi relasi antara customer dengan perusahaan, serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya. Bentuk produk dari revolusi industri 4.0 yaitu akan semakin berkembangnya teknologi untuk *3D printing*, bahkan bukan saja untuk mencetak produk, ada pula mencetak organ tubuh. Produk yang berkembang saat ini seperti semakin mudahnya untuk mengakses layanan secara *online*, baik belanja *online*, melakukan service kendaraan *online*, memesan makanan, bahkan pemeriksaan kesehatan secara *online*.

Harga yang ditawarkan untuk berbagai layanan dan jasa tersebut akan semakin murah dengan semakin masifnya inovasi yang dibuat oleh setiap perusahaan. Termasuk proses persaingan yang ketat antar perusahaan akan berakibat persaingan terkait harga dan menguntungkan pelanggan. Revolusi industri 4.0 tidak dapat ditolak karena telah dilihat bahwa penggunaan berbagai macam produk revolusi industri 4.0 telah dirasakan saat ini. Pada revolusi industry sebelumnya biasanya selalu didominasi oleh negara-negara Eropa dan Amerika yang memiliki berbagai modal yang lebih besar. Akan tetapi, revolusi industri 4.0 memungkinkan setiap negara untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya secara internal. Karena batas-batas negara akan semakin berkurang dengan masifnya pertukaran informasi di era digital.

Rhenald Kasali (Khasali, 2018) menyebut milenial sebagai generasi strawberry, yang digambarkan sebagai generasi yang menarik, namun rapuh karena tidak memiliki mentalitas dan nilai-nilai yang kuat. Semangat awal dari kemajuan teknologi adalah untuk mempermudah kehidupan manusia. Sejak penemuan mesin dan dimulainya era otomatisasi

telah membuat produksi semakin berlipat dan memangkas waktu serta biaya yang dikeluarkan. Namun demikian, pada akhirnya segala kemudahan ini berdampak besar manusia, karena membuat penggunaan tenaga manusia berkurang secara signifikan. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Tepat pada titik inilah, maka perlu adanya sebuah paradigma pembangunan yang tidak saja meningkatkan kemampuan manusia di bidang teknologi saja, namun juga perlu meningkatkan mentalitas manusianya sendiri. Harapan besar juga diarahkan kepada SDM muda agar mereka tumbuh dan berkembang di tengah tantangan kekerasan politik khususnya sikap mental yang terkait dengan terorisme dan radikalisme.

Dalam usaha membangun karakter itu maka diperlukan peran manajemen Strategis dalam dimensi kehumanioraan SDM terutama SDM UMKM. Tantangan dan peluang di era Revolusi Industri 4.0 bagi pelaku UMKM Pada saat ini, kapitalisme keuangan yang akan terjadi tidak berdampak pada "ekonomi riil" di mana aktivitas UMKM yang tidak mempunyai SDM Potensial bisa bekerja secara nyata terjadi. Kondisi bisnis saat ini lebih mementingkan keuntungan para pemegang saham (share holder value) daripada tatanan dan nilai-nilai keadilan sosial (social values)

Manajemen strategis terutama dalam hal ini praktek Manajemen Sumber daya Manusia Strategis yang merupakan MSDM Strategis pasca revolusi industri ditandai adanya kontribusi teori perilaku (Behavioral Theory). Harsey dan Blanchard dalam buku *Management of Organizational Behavior* menyatakan bahwa seorang behavior scientist berusaha menyatukan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu untuk dipergunakan sebagai alat untuk membuat keputusan tentang perilaku individu dan kelompok yang ada di setiap perusahaan. Disisi Lain Wheelan dan Hunger (*Strategic Manajemen and Business Policy Massachuset, 1995*) mengatakan bahwa Manajemen strategis adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan manajemen strategis yang diterapkan oleh seorang pelaku UMKM baru akan memiliki tingkat formalitas tertentu yang akan memberikan dampak terhadap efektivitas perencanaan strategisnya.

Dari uraian panjang diatas terungkap pembahasan penting untuk melihat bagaimana program ekonomi terutama pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah, serta jajaran terkait dalam rangka deradikalisasi dan penanggulangan

terorisme di Indonesia. Argumen studi ini adalah, bahwa pemerintah melakukan bantuan dan pemberdayaan ekonomi tanpa melibatkan secara sistematis stakeholder lokal dan daerah yang justru menjadi ujung tombak kegiatan dari program-program tersebut. Akibatnya, program dan bantuan ekonomi tidak mendapatkan evaluasi, perbaikan dan monitoring yang ketat. Ini berpengaruh kuat terhadap keberlanjutan dan kesinambungan program ekonomi bagi SDM berpotensi , khususnya kaum yang berpotensi terjangkau ideology radikal yang mendapatkan pendampingan.

Berdasarkan kondisi empirik asumsi diatas tentang UMKM berbasis manajemen strategik dan kerangka teori yang mendukung pembelajaran UMKM, maka fokus penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan nilai-nilai Management Startegik serta MSDM Strategik yang membentuk sikap dan perilaku pelaku UMKM dalam mengelola UMKM dengan nilai nilai keyakinan pemberdayaan ekonomi UMKM sebagai penguat ekonomi masyarakat yang menjadi landasan kuat membangun ikatan utama menangkal daya mental negative masyarakat dan mencegah paham negative seperti radikalisme dan terorisme akibat peningkatan daya saing UMKM di Era Revolusi Industri 4.0.

2. Pembahasan

a. Konsep Manajemen Strategik

Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia*, yang berarti kepemimpinan dalam ketentaraan. Menurut Freddy (1997), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya, konsep mengenai strategi terus berkembang. Sedangkan Mulyadi (2001) berpendapat bahwa strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi organisasi, melalui misi.

Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi, Dengan tindakan berpola, perusahaan dapat mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif ke perwujudan visi organisasi. Sebagai contoh, perusahaan yang memilih *differentiation strategy* akan memilih pola tindakan untuk menjadikan perusahaan berbeda karena keunggulannya di dalam persaingan.

Strategi dirumuskan untuk menggalang berbagai sumber daya organisasi dan mengarahkannya ke pencapaian visi organisasi. Tanpa strategi yang tepat, sumber daya organisasi akan terhambur konsumsinya, sehingga akan berakibat

pada kegagalan organisasi dalam mewujudkan visinya. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, strategi memainkan peran penting dan menentukan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. (Mulyadi, 2007)

Sedangkan Manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategis meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategis dan perencanaan jangka panjang), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. (Wheelen dan Hunger, 2001: 4)

Manajemen strategis adalah suatu proses yang digunakan oleh manajer dan karyawan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi perusahaan. Pada dasarnya manajemen strategis adalah suatu upaya manajemen dan karyawan untuk membangun masa depan perusahaan. Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mewujudkan visi perusahaan, melalui misi. (Mulyadi, 2007:38)

Menurut Stephen P. Robbins-Mary Coulter (2014:267) Manajemen strategik adalah apa yang manajer lakukan untuk mengembangkan strategi organisasi. Ini adalah tugas penting yang melibatkan semua fungsi manajemen dasar - perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan pengendalian. Menurut David & David (2015:39).

Dalam Proses Manajemen Strategik terdiri dari tiga tahapan yaitu : Perumusan Strategi, Implementasi strategi, dan Evaluasi Strategi.

Perumusan Strategi

Termasuk mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk mengejar. Strategi - isu formulasi termasuk memutuskan bisnis apa yang baru masuk, apa bisnis untuk meninggalkan, apakah akan bergabung atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana untuk menghindari pengambilalihan bermusuhan. David & David (2015:39).

Implementasi Strategi

Memerlukan suatu perusahaan untuk membangun *objectives* tahunan, menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan strategi - budaya yang mendukung, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. David & David (2015:40).

Evaluasi Strategi

Evaluasi Strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategis. Manajer sangat membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; evaluasi strategi adalah sarana utama untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi adalah subyek modifikasi masa depan karena faktor eksternal dan internal terus berubah. Menurut David & David (2015:40)

Terdapat tiga kegiatan evaluasi strategi fundamental yaitu:

1. Meninjau faktor eksternal dan internal yang dasar untuk strategi saat ini.
2. Mengukur kinerja.
3. Mengambil tindakan korektif.

Menurut David (2011:23), manajemen strategis memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Memungkinkan sebuah organisasi untuk lebih produktif.
2. Memungkinkan sebuah organisasi untuk mengarahkan dan memengaruhi berbagai aktifitas.
3. Membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan rasional.
4. Mencapai pemahaman dan komitmen dari semua manajer.
5. Hadirnya peluang bahwa proses tersebut menyediakan ruang yang mampu memberdayakan individu.

b. Pemberdayaan Ekonomi UMKM dalam Konsep Strategis Peningkatan Daya Saing.

Mengingat peran strategis UMKM dan masih terbatasnya kemampuan UMKM untuk berkembang, maka saat ini pengembangan usaha kecil merupakan salah satu strategi yang diambil Pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

Peran strategis UMKM ini maka perlu adanya pemberdayaan UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM, didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga 9 mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Asas Efisiensi adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan

mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdayasaing.

Asas Berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri. Asas Berwawasan Lingkungan adalah asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Asas Kemandirian adalah usaha pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian UMKM (UU No. 20/2008).

Dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia, (Bank Indonesia,2011) mengembangkan filosofi lima jari(*Five finger philosophy*), maksudnya setiap jari mempunyai peran masing-masing dan tidak dapat berdiri sendiri serta akan lebih kuat jika digunakan secara bersamaan.

1. Jari jempol, mewakili peran lembaga keuangan yang berperan dalam intermediasi keuangan, terutama untuk memberikan pinjaman/pembiayaan kepada nasabah mikro, kecil dan menengah serta sebagai Agents of development (agen pembangunan).
2. Jari telunjuk, mewakili regulator yakni Pemerintah dan Bank Indonesia yang berperan dalam Regulator sektor riil dan fiskal, Menerbitkan ijin-ijin usaha, Mensertifikasi tanah sehingga dapat digunakan oleh UMKM sebagai agunan, menciptakan iklim yang kondusif dan sebagai sumber pembiayaan.
3. Jari tengah, mewakili katalisator yang berperan dalam mendukung perbankan dan UMKM, termasuk Promoting Enterprise Access to Credit (PEAC) Units, perusahaan penjamin kredit Jari manis, mewakili fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM, khususnya usaha mikro, membantu UMKM untuk memperoleh pembiayaan bank, membantu bank dalam hal monitoring kredit dan konsultasi pengembangan UMKM.
4. Jari kelingking, mewakili UMKM yang berperan dalam pelaku usaha, pembayar pajak dan pembukaan tenaga kerja.

Menurut Afin (2013:45-49), memelihara momentum berarti melihat ke depan dan fokus pada saat ini. Peramalan dan perencanaan sangat penting untuk kelanjutan sukses sebuah perusahaan. Strategi berpikir mengajak kita memimpikan bisnis kita di masa datang dan cara memfokuskan diri pada pencapaian visi tersebut. Sebagaimana mengembangkan visi yang strategis untuk bisnis, ada lima kriteria terbesar yang seharusnya menjadi fokus, yaitu sebagai berikut:

1. Daya konseptual: kemampuan untuk berpikir tajam dan sistematis tentang masalah-masalah abstrak.
2. Perspektif yang *holistic* atau menyeluruh: kemampuan untuk melihat gambaran secara menyeluruh.
3. Kreatif: kemampuan berpikir di luar kotak yang selama ini kita tentukan sendiri.
4. Ekspresif: mampu mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Cara berpikir yang ekspresif terkadang bisa dipandang aneh oleh sebagian orang, terutama mereka yang tidak terbiasa menggunakan otak kanannya untuk berkreasi.
5. Toleransi untuk sifat mendua: pemikiran strategis yang mendua memiliki berbagai keunggulan karena ide yang dikeluarkannya benar-benar *fresh from the brain*.

Tujuan Pembangunan UMKM telah menjadi referensi penting bagi pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga pelaksanaannya. Walaupun mengalami kendala, namun pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak swasta dan lembaga donor.

Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium yang pertama yaitu menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan, Pemerintah Indonesia telah membuat berbagai kebijakan salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam hal ini UMKM dan koperasi. Peranan UMKM membantu perekonomian suatu daerah. Kehadiran UMKM tidak saja dalam rangka peningkatan pendapatan tetapi juga dalam rangka pemerataan pendapatan. Pemberdayaan UMKM merupakan langkah yang strategis dalam

meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Sijabat (2008) pemberdayaan UMKM tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang menjadi medium penumbuhan UMKM. Merancang konsepsi dasar pemberdayaan UMKM adalah membangun sistem yang mampu mengeliminir semua masalah yang menyangkut keberhasilan usaha UMKM. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan UMKM adalah iklim usaha. Aspek itu sendiri terkait erat dengan kemampuan sistem yang di bangun, sedangkan sistem yang dibangun terkait dengan banyak pelaku (aktor) dan banyak variable (faktor) yang berpengaruh nyata serta bersifat jangka panjang (*multies years*). Oleh karena sifatnya tersebut maka faktor-faktor ini sulit diukur keberhasilannya sebagai buah karya suatu instansi atau suatu pemerintahan.

Kondusifitas dari setiap faktor tersebut harus ditumbuhkan dan terus diperbaiki. Untuk mengetahui kondisi dari setiap faktor dan para pelaku yang berperan didalamnya perlu dilakukan evaluasi setiap waktu, setiap tempat dan setiap sektor kegiatan usaha UMKM. Seberapa jauh keberhasilan membangun sistem pemberdayaan UMKM dapat dilihat dari seberapa besar angka pertumbuhan UMKM dan pertumbuhan usahanya.

c. Manajemen Strategik Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM

Dalam menunjang kegiatan ekonomi Nasional, terutama dalam hal untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan antar sektor, maka keberadaan UMKM sangat strategis. Namun dalam melaksanakan peran strategis UMKM tersebut tidak jarang dijumpai kendala baik praktis maupun non praktis, baik secara internal maupun eksternal.

Tinjauan Manajemen Strategis UMKM saat ini diarahkan terutama dalam tinjauan MSDM Stratgeis yang dikaitkan dalam mempersiapkan konsep pemberdaaan Ekonomi pada UMKM menghadapi revolusi industry 4.0, sedikitnya ada tiga hal yang yang perlu diperhatikan semua pihak. *Pertama* adalah kualitas, yaitu upaya menghasilkan SDM yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi digital. *Kedua*, adalah masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang berkualitas, kompeten dan sesuai kebutuhan industri. *Ketiga*, adalah masalah distribusi SDM berkualitas yang masih belum merata.

Mengenai upaya peningkatan kompetensi dan produktivitas SDM, perlu dilakukan upaya yang masif melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja, badan setifikasi profesi yang sedang dilakukan pemerintah melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja dan program-program pemagangan. Untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0 tidak cukup hanya dengan literasi manusia lama, yang hanya mendasarkan pada kemampuan membaca, menulis dan menghitung.

Menurut Aoun (2017), untuk mendapatkan SDM yang kompetitif dalam industri 4.0, kurikulum pendidikan harus dirancang agar *out put*-nya mampu menguasai literasi baru, yaitu:

1. Literasi data, yaitu kemampuan membaca, menganalisis dan memanfaatkan informasi big data dalam dunia digital
2. Literasi teknologi, yaitu memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding*, *artificial intelligence* dan *engineering principles*,
3. Literasi manusia, *humanities*, komunikasi dan desain.

Dalam perspektif literasi manusia, tujuannya adalah agar manusia dapat berfungsi dengan baik di lingkungan manusia yang semakin dinamis. Perguruan tinggi perlu mencari cara baru untuk mengembangkan kapasitas kognisi manusia, yaitu : *higher order mental skills*, berfikir kritis dan sistemik. Dalam industry 4.0, modal dasar SDM yang harus dimiliki adalah : keterampilan yaitu kepemimpinan (*leadership*) dan bekerja dalam team (*teamwork*), kelincahan dan kematangan budaya (*cultural agility*), dengan latar belakang budaya yang berbeda tetap bisa bekerjasama, dan *entreprenurship* (termasuk *sociopreneurship*).

Namun demikian modal fundamental SDM yang selama ini dianggap sukses dalam praktek MSDM pada UMKM harus tetap diperhatikan. Lebih jelas lagi bahwa, untuk melaksanakan secara maksimal pemberdayaan ekonomi UMKM memang diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang bisa diandalkan, dalam hal ini adalah pimpinan dari berbagai lembaga atau institusi yang berwenang baik pihak swasta maupun pemerintah, mulai dari membuat perencanaan strategis, implementasi strategis sampai kepada evaluasi sesuai dengan langkah-langkah penerapan manajemen strategik itu sendiri.

d. Paham Radikalisme dan Terorisme

Radikalisme adalah sebuah paham atau aliran yang sering berpandangan kolot, bertindak dengan menggunakan kekerasan dan bersifat ekstrim untuk merealisasikan cita-citanya (Sadili Hasan:1984). Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa radikalisme adalah suatu paham yang menginginkan sebuah perubahan atau pembauran dengan cara drastis hingga ke titik yang paling akar.

Terorisme bukan persoalan siapa pelaku, kelompok dan jaringannya. Namun, lebih dari itu terorisme merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin dan ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Tumbuh suburnya terorisme tergantung di lahan mana ia tumbuh dan berkembang. Jika ia hidup di tanah gersang, maka terorisme sulit menemukan tempat, sebaliknya jika ia hidup di lahan yang subur maka ia akan cepat berkembang.

Ladang subur tersebut menurut Hendropriyono adalah masyarakat yang dicemari oleh paham fundamentalisme ekstrim atau radikalisme keagamaan.

Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal.

1. Intoleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain),
2. Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah),
3. Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan
4. Revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Memiliki sikap dan pemahaman radikal saja tidak mesti menjadikan seseorang terjerumus dalam paham dan aksi terorisme. Ada faktor lain yang memotivasi seseorang bergabung dalam jaringan terorisme. Motivasi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yg arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman

keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiyah). Sikap dan pemahaman yang radikal dan dimotivasi oleh berbagai faktor di atas seringkali menjadikan seseorang memilih untuk bergabung dalam aksi dan jaringan terorisme.

Dari beragam definisi baik oleh para pakar dan ilmuwan maupun yang dijadikan dasar oleh suatu negara, setidaknya memuat tiga hal: pertama, metode, yakni menggunakan kekerasan; kedua, target, yakni korban warga sipil secara acak, dan ketiga tujuan, yakni untuk menebar rasa takut dan untuk kepentingan perubahan sosial politik.² Karena itulah, definisi yang dijadikan dasar oleh negara Indonesia dalam melihat terorisme pun tidak dilepaskan dari tiga komponen tersebut Dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

e. Konektivitas Pemberdayaan Ekonomi UMKM dengan Paham Radikalisme dan Terorisme di Era Revolusi Industri 4.0.

Menurut Mello (2015) sedikitnya terdapat tiga dampak bagi organisasi untuk merespon perubahan teknologi baru, yaitu : (1) perlunya meningkatkan *skills* dan *work habits* pegawai, (2) tersingkirnya jabatan tingkat rendah dan level manajerial, (3) hirarki berkurang, lebih berorientasi pada kerjasama atau kolaborasi dan (4) Kehidupan pekerja pada era industry 4.0 didominasi oleh *self-directed striving for personally valued career outcomes* Hirschi et.al (2016).

The McKinsey Global Institute (2017) memperkirakan bahwa "50% dari lapangan pekerjaan berpotensi untuk diotomatisasi dengan mengadaptasi teknologi baru. Meskipun kurang dari 5% pekerjaan dapat sepenuhnya otomatis, namun 60% dapat memiliki 30% atau lebih dari kegiatan mereka dapat diotomatisasi secara teknis.

Dinamika dunia industri mengalami perkembangan secara pesat dimulai dari Revolusi Industri pertama dengan ditemukannya mesin mesin pada sektor sektor manufaktur, sektor pertanian, sektor pertambangan pada era 1750- 1850 secara langsung sangat mempengaruhi pembatasan tenaga manusia menjadi otomatisasi sistem dengan

digunakannya mesin-mesin otomatis pengganti tenaga manusia, efek langsung sangat terasa dikala dominasi sektor tenaga kerja yang bersifat padat karya berkurang dimana peran manusia akan berkurang.

Dampak sosial dan lingkungan dari proses proses yang tercipta di era revolusi Industri 4.0 ini adalah satu hal yang ironis dibalik kemudahan yang ditawarkan, Revolusi Industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif, diantaranya ancaman pengangguran akibat otomatisasi, kerusakan alam akibat eksploitasi industri, serta maraknya hoax akibat mudahnya penyebaran informasi. Selain membawa dampak persoalan lingkungan, revolusi industri juga akan meninggalkan persoalan yang berkaitan dengan hilangnya nilai-nilai sosial humaniora. Generasi milenial, generasi yang lahir pada sekitar tahun 1980-2000an, sudah menunjukkan adanya gejala-gejala degradasi mental. Gaya hidup konsumerisme, kebebasan yang tanpa batas, serta hilangnya perilaku etis dimedia sosial adalah serangkaian contoh dari degradasi tersebut.

Pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu pendekatan strategis dalam deradikalisasi dan pencegahan terorisme. Hubungan antara keamanan dan pembangunan “secara khusus terbukti ketika melihat di luar penafsiran tradisional keamanan nasional atas *human security*, termasuk ancaman lingkungan, ekonomi, kesehatan dan kriminal lainnya.” Pendekatan ini diterapkan di beberapa negara dalam kebijakan kontra terorisme mereka. John Horgan menyatakan pentingnya memisahkan individu dan kelompok kekerasan dari yang lain (*disengagement*). Horgan melanjutkan memahami proses —from involvement ...to disengagement” merupakan pendekatan baru psikologi teroris melalui sharing pengalaman para pelaku terorisme bagaimana mereka terlepas dari kelompok dan sel jaringan. Keputusan mereka untuk terlepas dari kelompok lama memiliki beragam alasan yang menarik untuk dikaji melalui multidimensi keilmuan. Dalam pengalaman di Indonesia, *disengagement* para mantan nara pidana yang notabene adalah kaum muda dan berpotensi melakukan effort terbaik setelah di luar penjara.

Pemberdayaan ekonomi bisa dikatakan sebagai salah satu pendekatan dan instrumen untuk pemisahan ini. SDM yang beorientasi radikal bisa diarahkan dalam pengembangan konsep usaha mandiri dalam bingkai pemberdayaan UMKM. Dan yang lebih terbuka dan bersedia bekerjasama dengan pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan kewirausahaan dan bekerja di sektor UMKM .

The Global Youth Wellbeing Index 2017 menyatakan bahwa Indonesia masih jauh dari upaya mendorong partisipasi kaum muda dalam perekonomian. Indonesia menempati peringkat terbawah dan urutan ke-20 dalam aspek kesempatan ekonomi bagi SDM yang masih relative muda. Sementara pada aspek kesejahteraan kaum muda, Indonesia masih berada pada level tengah di urutan ke-10 di kawasan Asia. Indonesia cukup kuat pada “civic engagement” dan pendidikan tetapi sangat lemah pada kesempatan ekonomi, kesetaraan gender. Partisipasi kaum muda dalam sosial politik serta inisiatif mereka dalam program pemberdayaan ekonomi memberi harapan besar bagaimana aspek ini menjadi kekuatan besar dalam membendung radikalisme dan terorisme melalui program ekonomi.

Dalam pembahasan tentang radikalisme dan terorisme ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya radikalisme dan terorisme, dan salah satu faktor yang paling urgen adalah faktor ekonomi dengan indikasi bahwa tingkat kemiskinan yang begitu tinggi, angka pengangguran juga sangat tinggi, dan, ketidakadilan sosial dalam bentuk terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, maka dalam kondisi seperti itu dalam iklim ketidakpuasan secara sosial dan ekonomi, tidak dapat dihindarkan sangat terbuka ruang bagi individu maupun kelompok tertentu untuk mencari solusi atau mencari alasan sebagai pembenaran atas tindakan anarkis mereka, dengan indikasi awal memiliki paham radikalisme yang berujung pada aksi teror.

Pada Sidang Umum PBB September 2014, Presiden AS Barack Obama menyatakan bahwa pendekatan kewirausahaan sangat strategis dalam mencegah dan mengatasi radikalisme dan terorisme. Steven R. Koltai dari Brookings Institute mengutip pernyataan Barack Obama soal pentingnya kewirausahaan bagi pondasi perdamaian yang lebih permanen. Koltai menyatakan bahwa “entrepreneurship is a job-creating machine, and jobs provide the growth and economic hope that are the foundation of peaceful, civil societies [Kewirausahaan adalah mesin yang menciptakan pekerjaan, dan pekerjaan-pekerjaan mendorong pertumbuhan dan harapan ekonomi yang merupakan pondasi masyarakat sipil yang damai].

Program penguatan keterampilan ekonomi kaum muda serta UMKM penting tidak hanya dalam rangka mencegah dan menanggulangi terorisme, tetapi juga untuk mengatasi masalah sosial, keamanan perbatasan, dan kriminalitas. Secara internasional posisi kaum muda Indonesia menempati level menengah dalam berbagai aspek. Tantangan besar

terdapat pada aspek kesempatan ekonomi di era revolusi industri 4.0 menjadi alat counter efektif dalam upaya menahan laju gerak signifikansi pertumbuhan kaum muda akan paham radikalisme dan terorisme.

Ini menjadi modal penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pendampingan dan dukungan lebih maksimal terhadap kaum muda dalam dunia usaha dan program ekonomi UMKM sekaligus menanggulangi radikalisme dan terorisme dikalangan usia potensial dan Sumber Daya Manusia yang potensial yang akan menjadi pilar utama perekonomian Bangsa

3. Kesimpulan

- a.** Kebijakan pemberdayaan ekonomi UMKM diharapkan mampu menunjukkan potensi keberhasilan untuk mengatasi dan mencegah terorisme serta sangat berpotensi mengurai masalah masalah fundamental terutama disektor ekonomi
- b.** program ekonomi dilakukan secara jangka pendek harus dilanjutkan dengan Aspek Manajemen Strategik dalam mengembangkan Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik harus memperhatikan aspek keberlanjutan
- c.** Kerja sama multistakeholder menjadi kebutuhan krusial dalam membangun pemberdayaan ekonomi secara jangka panjang dan komprehensif. Kerja sama ini diharapkan dalam upaya pemberdayaan ekonomi UMKM bisa mencapai sasaran yang diinginkan.
- d.** Tantangan besar terdapat pada aspek kesempatan ekonomi di era revolusi industri 4.0 menjadi alat counter efektif dalam upaya menahan laju gerak signifikansi pertumbuhan Sumber Daya Manusia yang akan paham radikalisme dan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Aoun, J.E. (2017). *Robot-proof: higher education in the age of artificial intelligence*. US: MIT Press.
- Assery, S. 2009. Strategi Mempercepat Pemberdayaan UMKM. *Harian Suara Merdeka*, 27 Mei 2009.
- David, R Fred. 2012. *Strategic Management Concepts & Cases*. Pearson Academic; 14th edition
- Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia. 2016. Pemetaan dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan Pasca MEA 2025. Diakses dari www.bi.go.id pada tanggal 16 Oktober 2016.
- Eelco Kessels and Christina Nemr, "Countering Violent Extremism and Development Assistance entrepreneurship/ Harvey W. Kushner, *Encyclopedia of Terrorism*, London : Sage Publication, 2003.
- Hirschi & Läge. 2007. Various Grade Readiness. *Journal of Vocational Behavior*.
- <https://www.youthindex.org/sites/default/files/2017YouthWellbeingIndex.pdf>
- Identifying Synergies, Obstacles, and Opportunities," Policy Brief, February 2016, Global Center on Cooperative Security. Accessed on January 04, 2018 from <http://www.allobalcenter.org/wp-content/uploads/2016/01/Feb-2016-CVE-and-Development-policy-brief.pdf>.
- John G. Horgan, "Psychology of Terrorism: Introduction to the Special Issue," *American Psychologist*, 2017, Vol. 72, No. 3, hal. 201.
- John Horgan et al, "Walking away: the disengagement and de-radicalization of a violent right-wing extremist," *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression*, 2016, Society for Terrorism Research.
- Kasali, Rhenald. 2011. *Membidik Pasar Indonesia: Segmentasi, Targeting, dan Positioning*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

- McKinsey Global Institute, (2017). *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*. McKinsey & Company.
- Mello, A. Jeffrey (2015), *Strategic Human Resource Management*, 4th Edition, Cengage Learning Publisher
- Mulyadi. 2001. Balance Scorecard: alat Manajemen Kontemporer Untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan. Salemba Empat. Jakarta.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Robbins, P. Stephen. 2008. *Organizational Behaviour, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Ke Sepuluh)*, alih bahasa Drs. Benyamin Molan. Salemba Empat: Jakarta.
- Roblek, V., Meško, M., & Krapež, A. (2016). A Complex View of Industry 4.0. *SAGE Open*, 6(2), 215824401665398. <http://dx.doi.org/10.1177/2158244016653987>
- Sijabat, S. 2008. Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UMKM. *Infokop*, 16. 1-17.
- Sijabat, S. 2008. *Potret Iklim Usaha Pemberdayaan UMKM*. Infokop.
- Steven R. Koltai, "Fighting ISIS with Entrepreneurship," 7 Oktober 2014. Diakses pada 30 Januari 2018 dari <https://www.brookings.edu/blog/fixgov/2014/10/07/fighting-isis-with->
- Sudaryanto dan Hanim, Anifatul. 2002. Evaluasi kesiapan UKM Menyongsong Pasar Bebas Asean (AFTA): Analisis Perspektif dan Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol 1 No 2, Desember 2002
- Sudaryanto. 2011. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, Jakarta. Fakultas Ekonomi Negeri Jember
- The Global Youth Wellbeing Index 2017” diakses pada 30 Januari 2018 dari dari <https://www.youthindex.org/country/indonesia>.
- Undang-Undang No. 19 tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 88
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UNDP United Nations Development Programme, "Human Development Report," United Nations Development Programme (UNDP), New York, 2017

UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Wheelen Thomas.L, Hunger J. David, 2001.*Strategic Management and Business Strategy*, 10-th edition, Pearson International Edition

Yuhua, Z., & Bayhaqi, A. (2013). *SME's participation in global production chains: APEC*.

Yuhua, Z., dan Bayhaqi, A. (2013). *SME's Participation in Global Production Chains*. APEC: Singapore.